

ABSTRAK

Noris Nurussabah: *Perjanjian Pinjaman Tambahan Modal Usaha Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Garut Dikhubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313*

Pembangunan dan pengembangan prekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang pertanian telah menunjang pembangunan yang telah ditetapkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Secara kasat mata, pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Garut telah berdiri dan terlaksana melakukan kegiatan usaha. Secara empirik terlihat banyak kegiatan yang dilakukan salah satunya kegiatan pameran Bumdes, bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa sudah semestinya memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Garut.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pelaksanaan Pinjaman Tambahan Modal Usaha Dalam Rangka Program Kemitraan Usaha Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), menemukan kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam menjalankan usahanya, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kemudian melakukan analisa dengan menggunakan asas-asas yang relevan dan mensinkronisasi peraturan perundang-undangan satu sama lain. Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa dalam Pelaksanaannya pinjaman tambahan modal BUMDes kepada para petani yang membutuhkan pinjaman, wajib menjaminkan barang miliknya misalnya BPKB kendaraan, surat tanah, atau lahan pertanian sebagai jaminan. Para Petani dikenakan Bunga sebesar 1% per bulan dan besaran bunga yang mencapai sekitar 12% setiap tahun. Kendala yang dihadapi BUMDes dalam menjalankan usahanya dalam perjanjian belum sesuai dengan KUHPerdota tentang Perjanjian. Hal ini sangat beresiko dikarenakan mekanisme penyaluran modal tidak melakukan pendampingan. Pada aspek perencanaan tidak adanya kriteria rekrutmen anggota yang jelas, pada aspek pengarahannya lemahnya sosialisasi masih banyak nasabah yang tidak memahami isi perjanjian hal ini juga yang menyebabkan terjadi kredit macet. Mekanisme penyelesaian sengketa BUMDes hingga saat ini penyelesaian secara non litigasi yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat upaya ini merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan antara Petani dengan Badan Usaha Milik Desa.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Penyelesaian Sengketa

ABSTRAK

Noris Nurussabah: *Additional Business Capital Loan Agreement Between Farmers And Village Owned Enterprises (Bumdes) In Garut District Is Connected With The Book Of Civil Law Article 1313.*

Economic development and development in general and especially in the agricultural sector have supported the established development, Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and are formed based on the needs and potential of the village. In plain view, the formation of Village Owned Enterprises in Garut Regency has been established and carried out conducting business activities. Empirically, it can be seen that there are many activities carried out, one of which is the Bumdes exhibition, that the existence of Village-Owned Enterprises should have an economic and welfare impact on the people in Garut Regency.

This study aims to find out how the implementation of additional business capital loans in the context of the Business Partnership Program between Farmers and Village-Owned Enterprises (Bumdes), find out what are the obstacles faced by Village-Owned Enterprises (Bumdes) in running their business, and to find out how the settlement mechanism is. dispute over Village-Owned Enterprises (Bumdes).

This research method uses a normative juridical approach, namely legal research by conducting a study of various laws and regulations, then analyzing using relevant principles and synchronizing the laws and regulations with each other. In addition, this study also uses the empirical juridical method, which combines the normative legal approach with the addition of an empirical element.

Based on the results of the study, it was found that in the implementation of BUMDes additional capital loans to farmers who need loans, they are obliged to guarantee their belongings, for example BPKB vehicles, land certificates, or agricultural land as collateral. Farmers are charged an interest of 1% per month and an interest rate of around 12% every year. The obstacles faced by BUMDes in running their business in the agreement are not in accordance with the Civil Code regarding the Agreement. This is very risky because the capital distribution mechanism does not provide assistance. In the planning aspect, there is no clear member recruitment criteria, in the direction of lack of socialization, there are still many customers who do not understand the contents of the agreement. This also causes bad credit. The BUMDes dispute settlement mechanism to date is non-litigation settlement, namely by way of deliberation and consensus. This effort is an effort to bargain or compromise to obtain a mutually beneficial solution between farmers and village-owned enterprises.

Keywords: Agreement Law, Dispute Resolution